KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Jangan lagi ada korupsi. DPR dukung pengawalan ketat penyaluran bansos
Tanggal : Kamis, 07 Januari 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Jangan Lagi Ada Korupsi

DPR Dukung Pengawalan Ketat Penyaluran Bansos

Senayan mendukung pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) diperketat. Seluruh elemen bangsa diminta terlibat aktif mengawasi penyaluran bantuan agar efisien dan tepat sasaran.

"KAMI mendukung pernyataan dan keinginan Bapak Presiden Jokowi mengawal ketat penyaluran bansos. Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran," ujar Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Diketahui, Pemerintah berencana menyalurkan Rp 110 triliun lewat sejumlah program bansos ke masyarakat. Program ini dilakukan untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Khusus Januari, bantuan lewat kartu sembako ditujukan kepada 18,8 juta keluarga dengan total anggaran Rp 3,76 triliun. Bantuan Program Keluarga Harapan diberikan kepada 10 juta keluarga dengan total Rp 7,7 triliun. Sementara bantuan sosial tunai sebesar Rp 3 triliun disalurkan kepada 10 juta keluarga.

Melanjutkan keterangannya, Azis mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) dan *stakeholder* terkait berkoordinasi dengan baik untuk memastikan penyaluran bansos berjalan cepat dan tepat sasaran. Memastikan agar tidak ada potongan-potongan di tengah jalan. Mekanismenya juga harus transparan dan akuntabel.

"Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat terendah RT/RW. Agar ada kejelasan alur pendataan akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial," tegas politisi Partai Golkar ini.

Azis berharap, Pemerintah melakukan evaluasi penyaluran bansos di beberapa daerah yang sering kali terkendala permasalahan data. Pasalnya, ketepatan dan akurasi data tak sekadar berdampak pada penerima, tapi efek besar yang diharapkan Pemerintah dari penyaluran bantuan tersebut.

Azis mengatakan, program ini dilakukan untuk menekan dampak ekonomi pandemi Covid-19. Penyaluran bansos diharapkan dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, tak ada potongan dalam bantuan tunai yang diberikan ke masyarakat terdampak pandemi.

"Ini saya ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima tidak ada potongan-potongan," kata Jokowi saat peluncuran bantuan tunai di Istana Negara.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta keterlibatan seluruh pihak dalam pengawasan. Penyaluran bantuan yang efisien dan tepat diyakini akan berdampak pada ekonomi Indonesia di tengah pandemi.

"Kepada para menteri, gubernur agar mengawal proses penyaluran ini agar cepat, tepat sasaran dan diawasi agar tidak ada potongan," pintanya. ■ ONI